



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL PASCA 2015

DEPUTI SESWAPRES BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN/
SEKRETARIS EKSEKUTIF TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

OKTOBER 2012



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

AGENDA PEMBANGUNAN GLOBAL

PERKEMBANGAN MDGs

PERKEMBANGAN MDGs

- BAGI NEGARA BERKEMBANG:

Mendorong Perdebatan dan Polemik, tetapi tidak nyata-nyata mempengaruhi *resource allocation*

- BAGI NEGARA DONOR:

Menguatkan akan pentingnya melihat keberhasilan dengan indikator yang terukur, dalam bidang yang diminati, jika bantuan ingin terus berlanjut

Source: Richard Manning. 2010. The Impact and Design of the MDGs: Some Reflections. Institute of Development Studies (IDS) Bulletin 41.1

PERKEMBANGAN MDGS

- “It is a lot to ask of one legally toothless document, silent on the necessary steps to achieve its declared goals, to dramatically and observably change the course of global development -- however grand the signatories”
- “It is impossible to say with any certainty what was the impact of the MDGs”
- May well have played a role in increasing aid flows
- Weak available evidence, limited impact on policies in developing countries

Source: Charles Kenny and Andy Sumner. 2011. More Money or More Development: What Have the MDGs Achieved? CGD Working Paper 278

STRATEGY PEMBANGUNAN GLOBAL KEDEPAN PASCA MDGs

STRATEGY KEDEPAN

- 1. Menggunakan indikator MDGs yg sekarang dalam rangka menyelesaikan Pekerjaan Rumah yg belum selesai**
 - Getting the job done
- 2. Mempertajam Indikator MDGs Saat Ini**
 - Kemiskinan menggunakan 2 US \$ PPP/hari
 - Malnutrition
 - Umur Harapan Hidup
 - Buta Huruf dan Pendidikan Menengah
 - Kesenjangan gender pada anak2 pra sekolah

STRATEGY KEDEPAN

3. Menyusun Indikator Baru

→ **Menambah Indikator Baru dalam rangka melengkapi indikator yg ada**

- Indikator Penggunaan energi alternatif
- Pelayanan Kesehatan Dasa

→ **Perluasan Bidang**

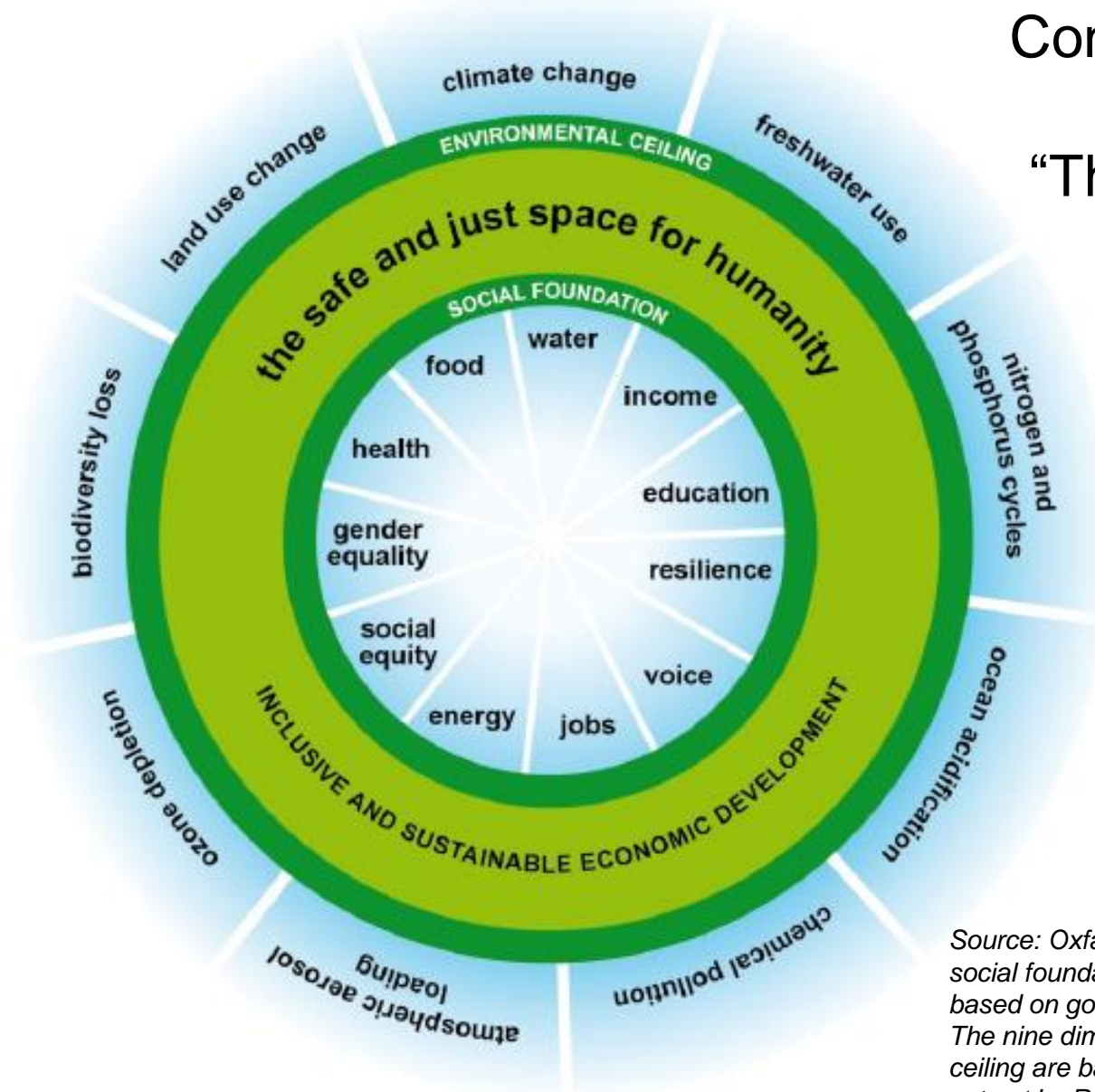
- Human settlement Development
- Ketahanan Pangan
- Renewable Resources
- Social Justice

MDGs VERSI 2



Post-2015 Goals, Targets,
and Indicators
Background Paper
Paris, April 9-11, 2012
Barry Carin and Nicole
Bates-Eamer. CIGI.

Contribution from Oxfam: “The Doughnut”



Source: Oxfam. The 11 dimensions of the social foundation are illustrative and are based on governments' priorities for Rio+20. The nine dimensions of the environmental ceiling are based on the planetary boundaries set out by Rockström et al (2009b)

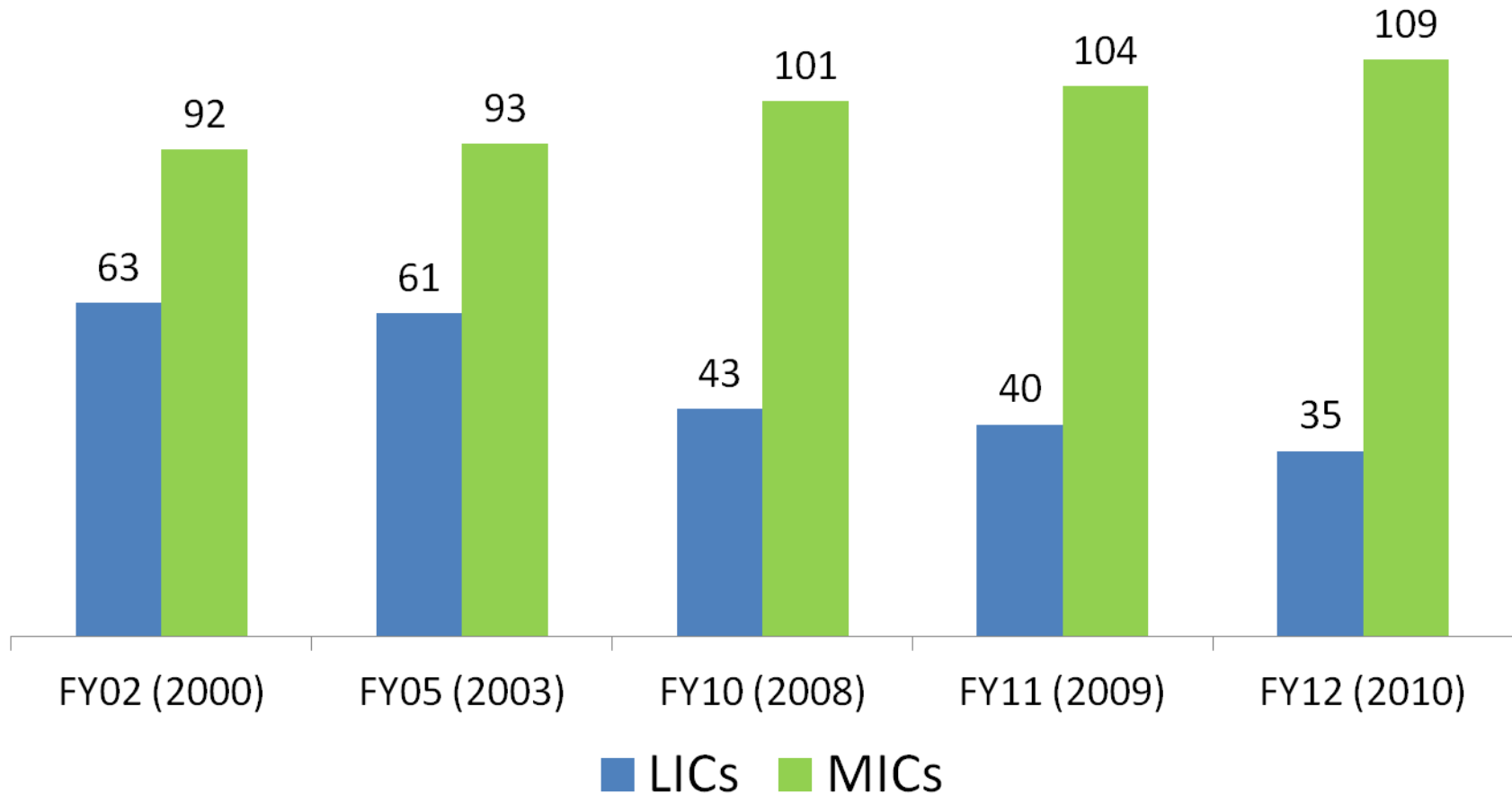
ISU KEMISKINAN



KEMISKINAN SECARA GLOBAL

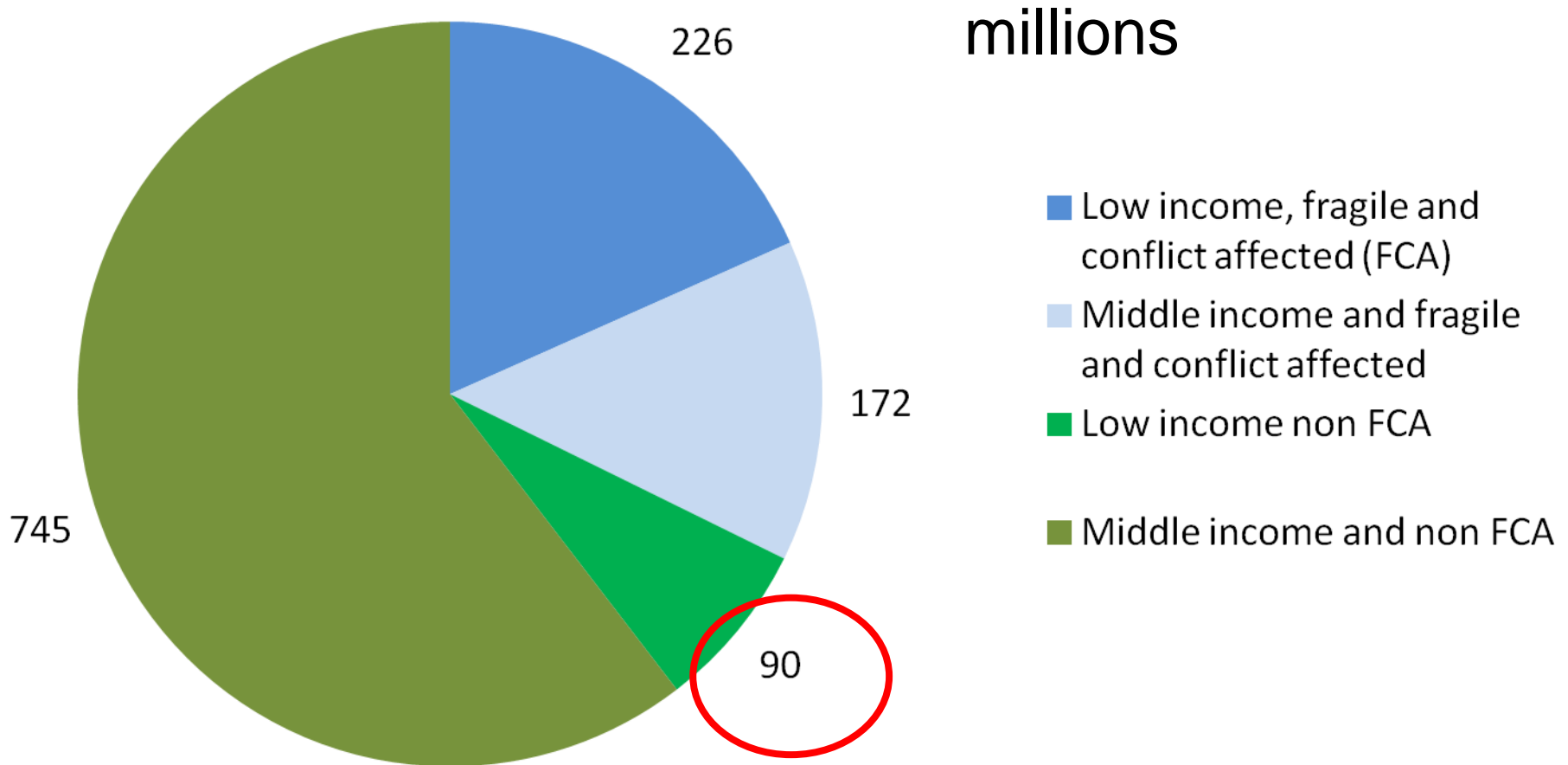
- 1995-2000, 75% orang miskin berada di Low Income Countries
- 2012-2015, 75 % orang miskin berada di Middle Income Countires
- Phenomena Urban
- Inequality flat, tetapi banyak negara membaik

TRENDS IN NUMBER OF LIC AND MIC COUNTRIES



Source: Andy Sumner. June 2012. Where Do The World's Poor Live? A New Update. IDS WP 393

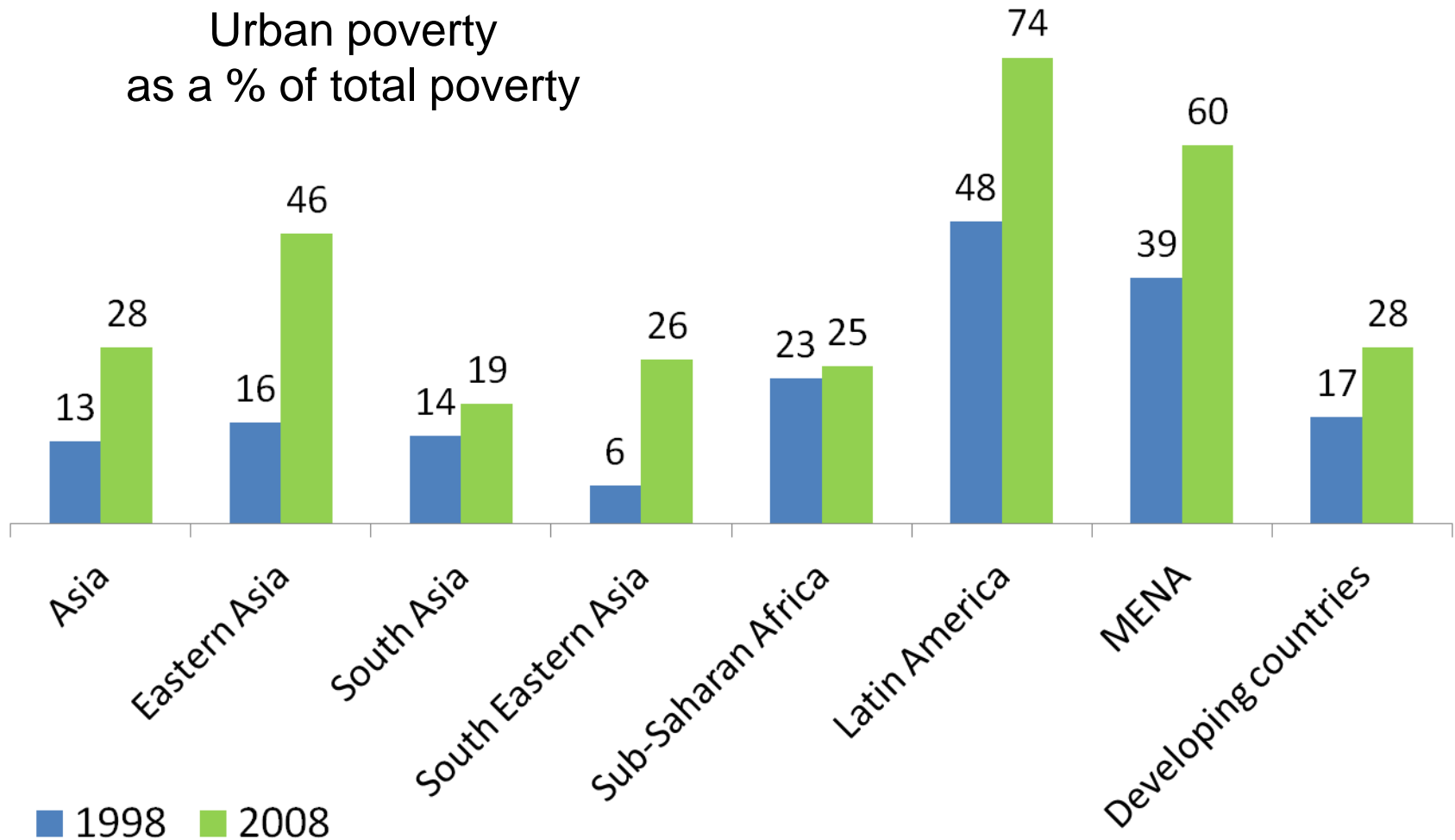
LOCATION OF PEOPLE LIVING BELOW \$1.25 A DAY



Source: Andy Sumner. June 2012. Where Do The World's Poor Live?
A New Update. IDS WP 393

POVERTY IS URBANISING

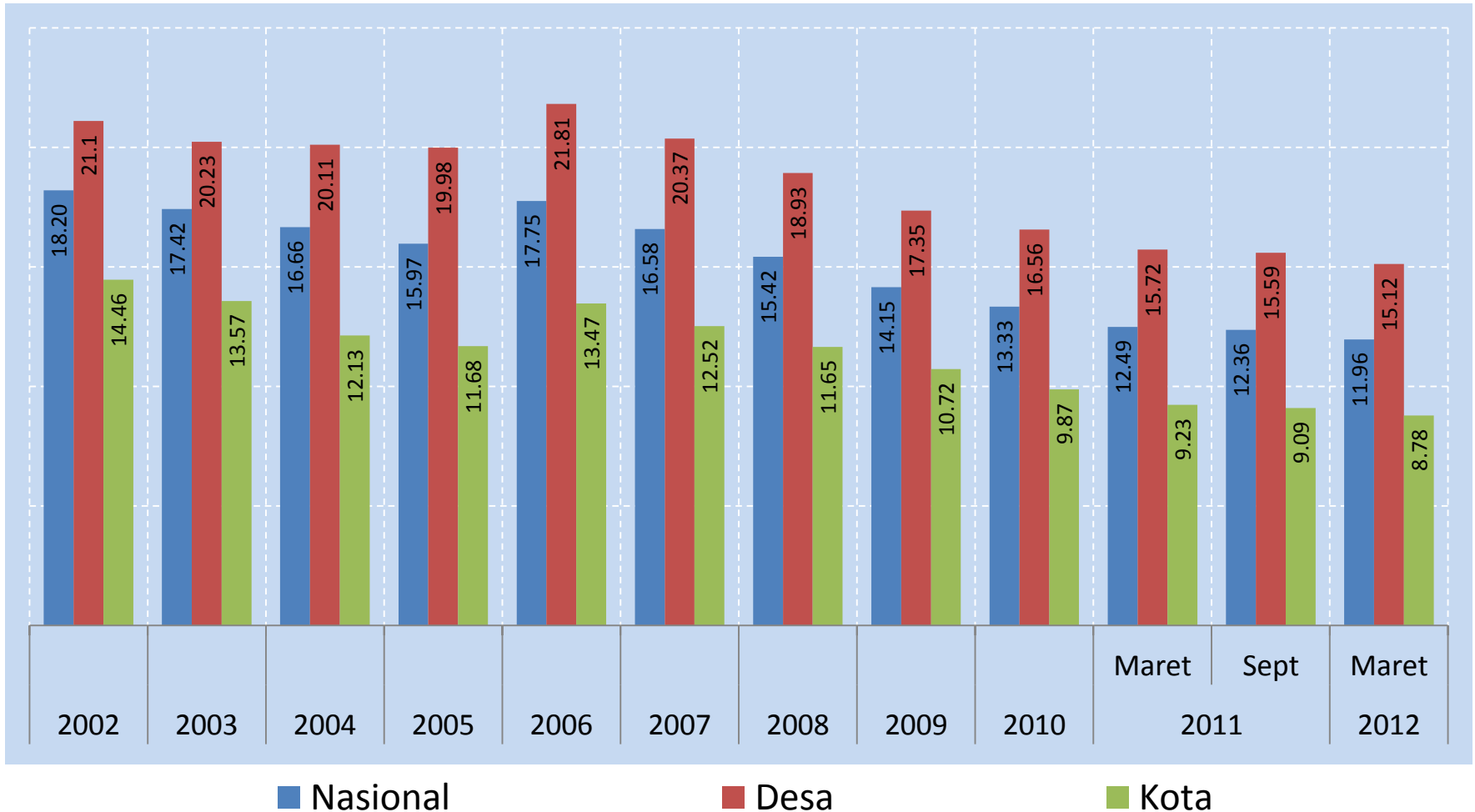
Urban poverty
as a % of total poverty



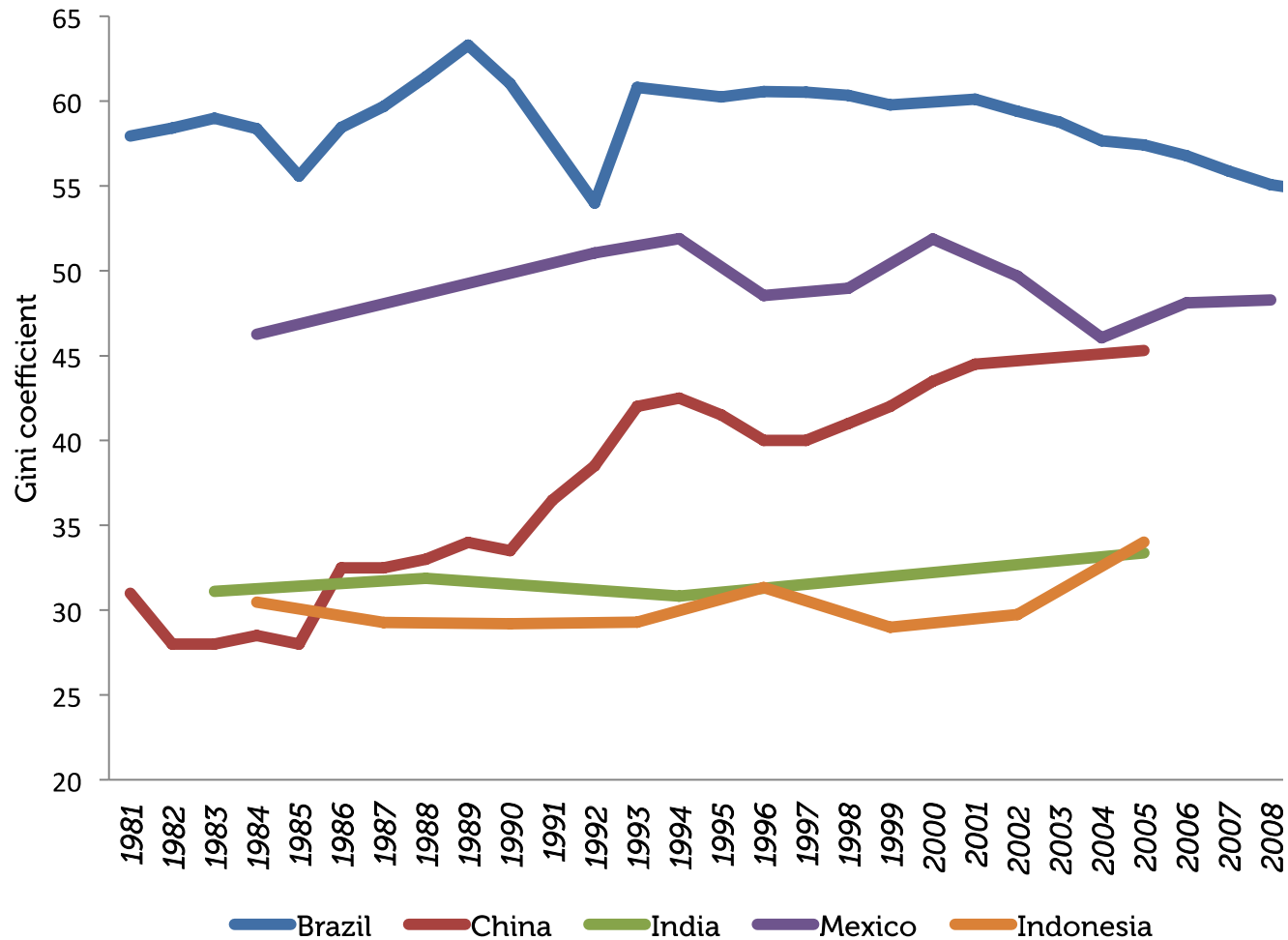
Source: IFAD 2011



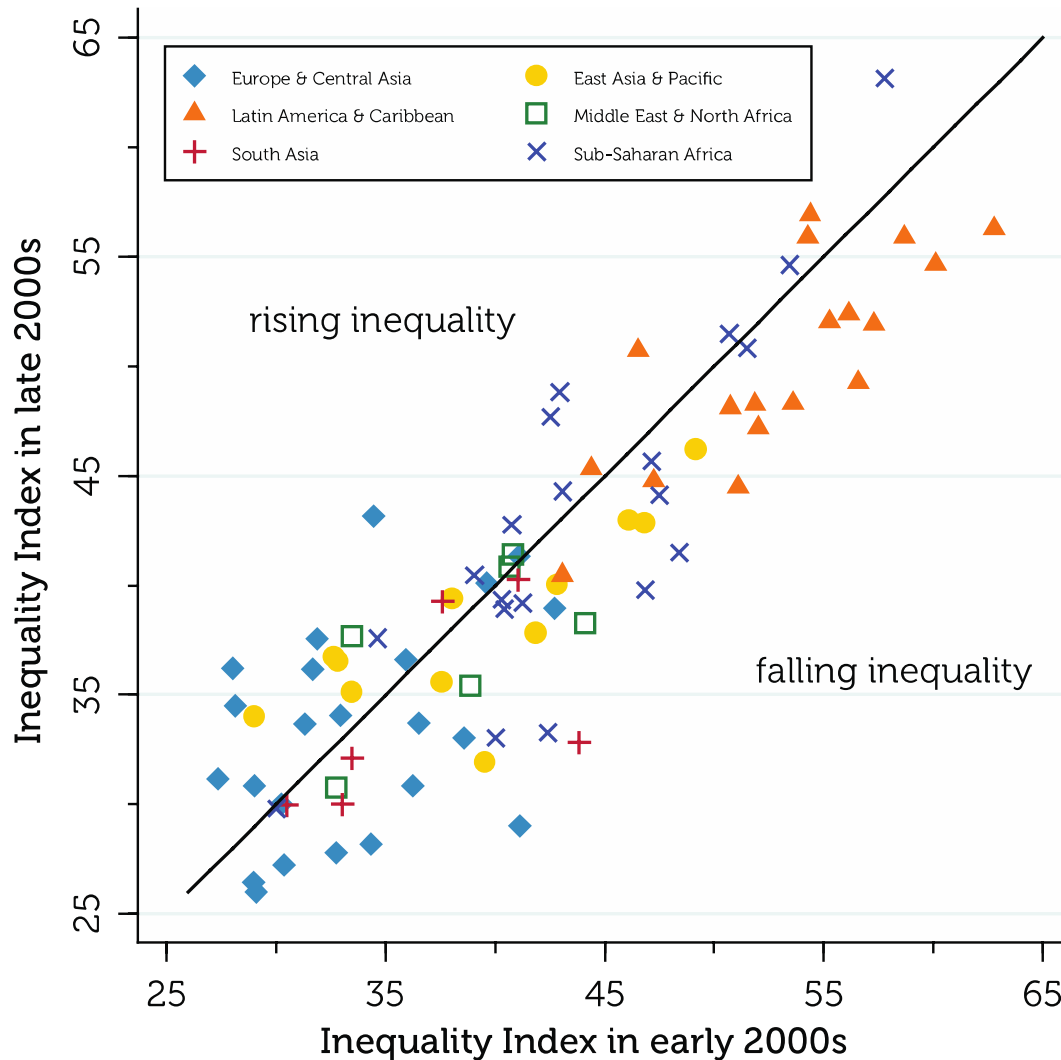
TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA NASIONAL, PERDESAAN, DAN PERKOTAAN



INEQUALITY DI BEBERAPA NEGARA



Source: World Bank. World Development Indicators and World Bank 2012. "China 2030."



Lebih banyak negara mengalami perbaikan distribusi pendapatan

Source: World Bank. World Development Indicators and World Bank. 2012. "China 2030"

STRATEGY PENANGGULANGAN KEMISKINAN

STRATEGY PENANGGULANGAN KEMISKINAN GLOBAL

→ Konsensus Politik Global:

Economic Growth, Social Equality, and Environmental Sustainability

→ Bapak Presiden RI

- “The Agenda should promote Equitable Development, Sustainable Growth with Equity, and strengthened global partnership”
- Zero Global poverty Rate by Mid 21st century

BIGGEST ECONOMIES IN 1998 AND 2008 BY GDP (PPP)

Rank 1998	Country	Rank 2008	Country
1	USA	1	USA
2	Japan	2	China
3	China	3	Japan
4	Germany	4	India
5	France	5	Germany
6	UK	6	Russia
7	India	7	UK
8	Italy	8	France
9	Brazil	9	Brazil
10	Russia	10	Italy
11	Mexico	11	Mexico
12	Spain	12	Spain
13	Canada	13	Korea
14	Korea	14	Canada
15	Turkey	15	Turkey
16	Australia	16	Indonesia
17	Indonesia	17	Iran
18	Netherlands	18	Australia

Source: Juha Jokela. 2011. THE G-20: A PATHWAY TO EFFECTIVE MULTILATERALISM?
Institute for security Studies European Union Paris.

STRATEGY PENANGGULANGAN KEMISKINAN GLOBAL

- ➔ Meningkatkan Pendapatan Melalui
Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif
- ➔ Mengurangi Beban pengeluaran
 - ❑ Akses terhadap fasilitas dasar
 - Kesehatan
 - Pendidikan
 - Perumahan, air bersih, dan sanitasi
 - ❑ Ketahanan Pangan
 - ❑ Infrastruktur Ekonomi

STRATEGY PENANGGULANGAN KEMISKINAN GLOBAL

Bagi Mereka yang Tidak Dapat Memanfaatkan Pertumbuhan Ekonomi:

→ Progressive Social Policy

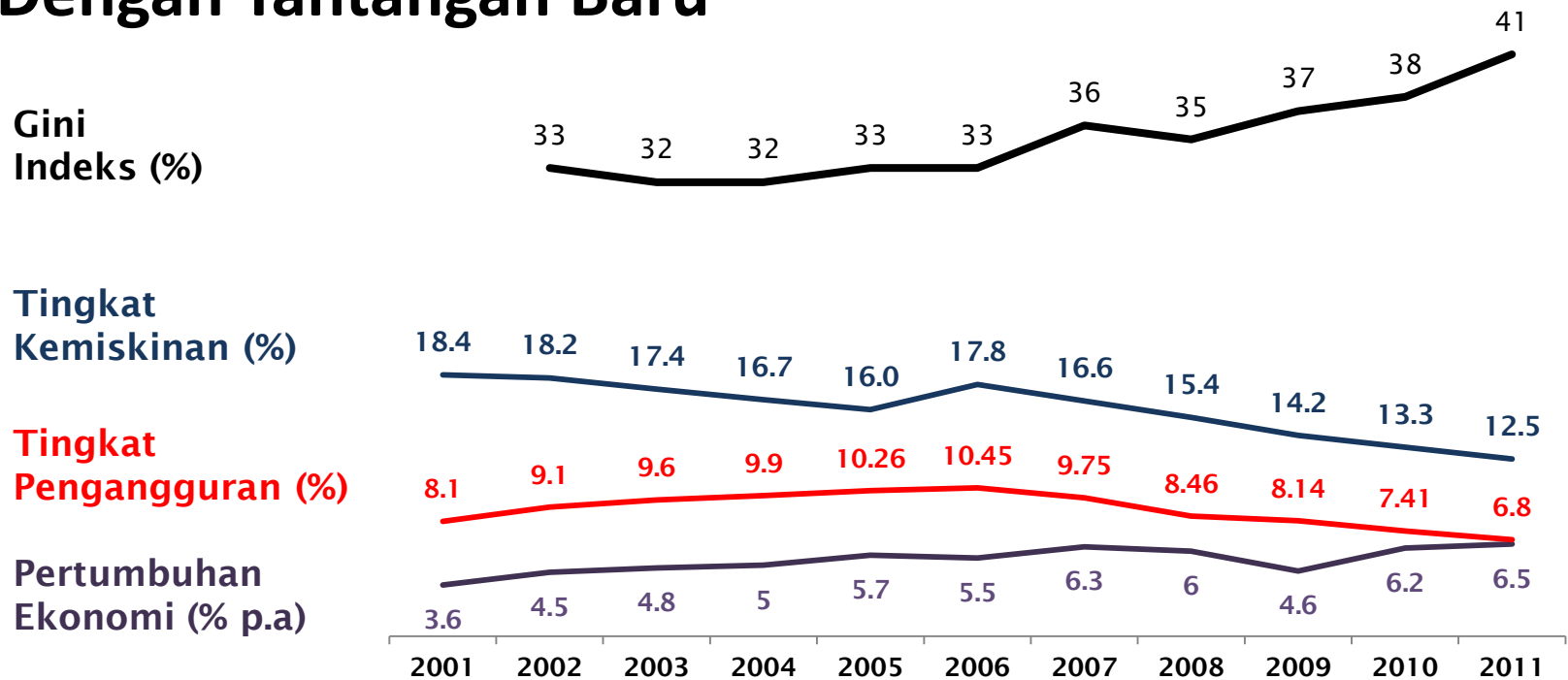
→ Limited Affirmative Action

STRATEGY PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Pembangunan berhasil membentuk Kelas Menengah Namun masih menyisakan Kelompok Miskin & Rentan

	Pengeluaran/kapita (Rp/bulan)	Proporsi Penduduk (%)		Jumlah Penduduk (Juta)	
		2003	2010	2003	2010
Miskin & Rentan	< 225 ribu	21.9	14	47.1	33.0
	225 ribu - 360 ribu	40.4	29.3	86.9	69.1
Kelas Menengah	360 ribu - 720 ribu	32.1	38.5	69.0	90.9
	720 ribu - 1,1 juta	3.9	11.7	8.4	27.6
	1,1 juta - 1,8 juta	1.3	5	2.8	11.8
	1,8 juta - 3,6 juta	0.3	1.3	0.6	3.1
Kaya	> 3,6 juta	0.1	0.2	0.2	0.5

Terjadi Perbaikan Ekonomi Dengan Tantangan Baru



Pendapatan per Capita (US\$)	772	922	1098	1186	1318	1663	1938	2270	2350	3005	3543
------------------------------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- Namun pertumbuhan ekonomi belum cukup cepat: (a) Dibandingkan periode 1985-1995; (b) Dibandingkan negara lain seperti India dan Cina
- Meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, namun kesenjangan meningkat

REKAP: *TRIPLE-TRACK PROBLEM*

MISKIN – RENTAN - TIMPANG

POVERTY

Masyarakat hidup di bawah GK
→ Bagaimana mengangkat mereka ke atas GK

VULNERABILITY

Masyarakat tidak jauh dari GK
→ Bagaimana menjaga supaya tidak jatuh

INEQUALITY

Ketimpangan antardaerah, antarkelompok masyarakat
→ Kebijakan redistributif

Singkatnya...

1. Tantangan Indonesia: miskin, rentan, timpang
2. Tugas Negara adalah ***Managing Opportunities*** – membantu seluruh masyarakat memanfaatkan kesempatannya masing-masing
3. Program penanggulangan kemiskinan & perlindungan sosial
4. Penguatan komunitas melalui pemberdayaan masyarakat agar dapat mengakses sumber daya ekonomi dan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih
5. Pertumbuhan yang inklusif

PROSES PEMBANGUNAN

MEMPERBAIKI KESEJAHTERAAN

MENYEDIAKAN PILIHAN

MENYEDIAKAN KESEMPATAN

Perbaiki KESEJAHTERAAN dimungkinkan jika ada pilihan. Karena itu PEMBANGUNAN adalah proses memperbanyak PILIHAN bagi individu, rumah tangga, masyarakat.

Namun, PILIHAN tidak akan berguna tanpa adanya KESEMPATAN yang terbuka bagi individu, rumah tangga, masyarakat untuk memanfaatkannya

Tugas Negara:

Managing Opportunities

– m e n a t a k e s e m p a t a n –

Tugas Pemerintah adalah menjamin agar seluruh masyarakat dapat memanfaatkan/menata kesempatannya masing-masing yang bersumber dari pembangunan ekonomi

Social Opportunities

Economic Opportunities

Keduanya ini adalah hak dasar dari seluruh warga negara Indonesia
→ Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa

Karena itu, diperlukan adanya

**Program Penanggulangan Kemiskinan
Program Perlindungan Sosial
Penguatan Komunitas
Pertumbuhan Ekonomi yang Dinikmati Merata**

Seperangkat upaya Negara untuk menjamin bahwa kelompok Miskin & Rentan akan dapat terpenuhi haknya untuk memanfaatkan dan menata berbagai kesempatan (*opportunity*) yang timbul sebagai buah pembangunan

Program Penanggulangan Kemiskinan Program Perlindungan Sosial

Seperangkat upaya Negara untuk menjamin bahwa kelompok Miskin & Rentan akan dapat terpenuhi haknya untuk memanfaatkan dan menata berbagai kesempatan (*opportunity*) yang timbul sebagai buah pembangunan

Perlindungan sosial berbasiskan hak

Penanggulangan kemiskinan berbasiskan peningkatan produktivitas

PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERDASARKAN SASARAN

- 1. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Individu atau Rumah Tangga (Klaster I)**
- 2. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas (Klaster II)**
- 3. Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Usaha Mikro dan Kecil (Klaster III)**

DIMENSI HAK & PERLINDUNGAN

Dalam konteks Program Pemerintah (saat ini)

		Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin
1 Resiko Kesehatan	Kesehatan Dasar ↑ ↓ Catastrophic	PKH	Jamkesmas (Seluruh peserta PKH otomatis peserta Jamkesmas)	
2 Keberlanjutan Pendidikan	Pendidikan Dasar ↑ ↓ Pendidikan Tinggi	PKH (s/d SLTP)	Bantuan pendidikan (Terintegrasi memastikan keberlanjutan jenjang, Seluruh peserta PKH otomatis mendapatkan bantuan pendidikan)	
3 Guncangan Ekonomi	Ketidakmampuan ↑ ↓ Dampak kebijakan	PKH	Raskin	
		Cash for work		
		Bantuan tunai		
		Pada kondisi krisis dimungkinkan program perlindungan lainnya		

KOMPLEMENTARITAS

Program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan harus bersifat komplementer satu sama lain

- **KEPESERTAAN** – terintegrasi dengan Basis Data Terpadu
Kelompok yang paling miskin seyogyanya mendapatkan seluruh program secara utuh
- **KETERPAUTAN SUBSTANSI PROGRAM** –
Contoh: PKH–PNPM, atau PNPM–KUR

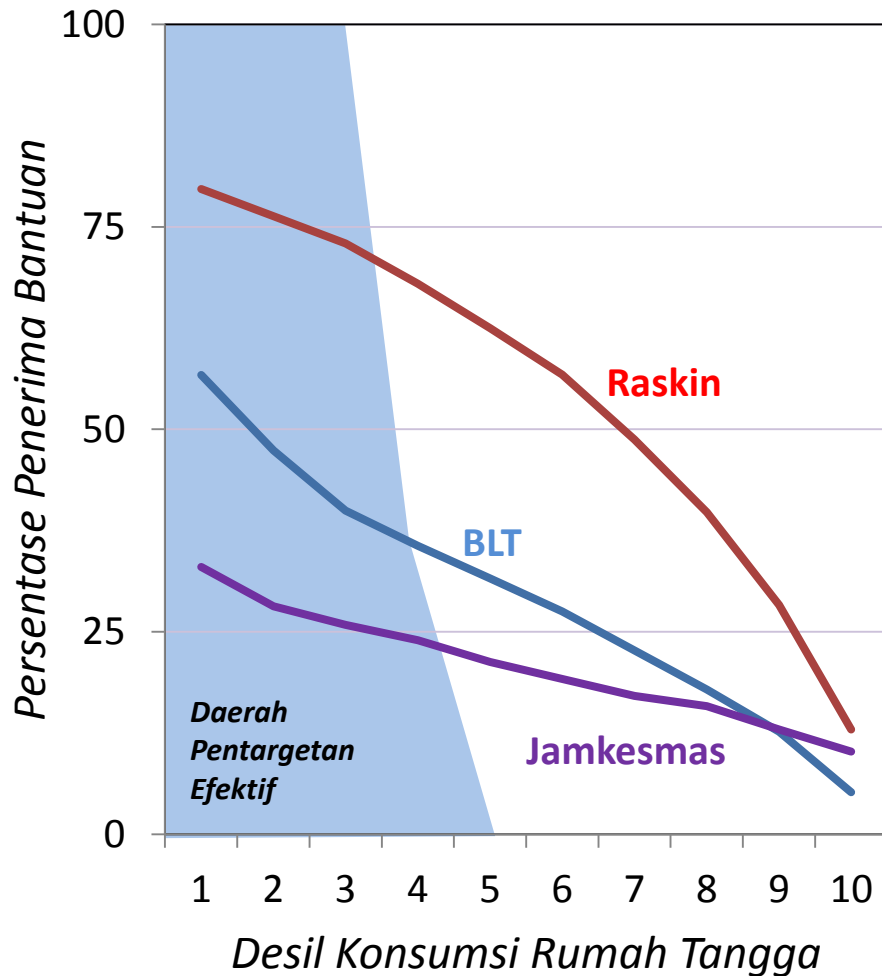
Dalam konteks Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, pemenuhan dimensi Hak & Perlindungan tadi haruslah dilakukan dengan tepat sasaran.

Untuk itu, kuncinya adalah:

Basis Data Terpadu (BDT)

Basis Data Terpadu (BDT) adalah data yang terintegrasi, bersumber dari kegiatan Pendataan PPLS 2011, memungkinkan penetapan penerima (*targeting*) Program Perlindungan Sosial secara terpadu dan tepat sasaran.

EFEKTIFITAS PENTARGETAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL SELAMA INI



Hanya sekitar 30% penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas)



Efektifitas pentargetan setiap program dapat diperbaiki apabila seluruh program menggunakan basis data yang sama (*unified*)

Sumber: Susenas 2009

Isu Kebijakan (tingkat) Program

*** Beberapa inisiatif yang dikembangkan TNP2K


PKH

- Dijalankan sebagai CCT, menuju layanan 3 juta RT (approx. 5% terendah) – Staf, MIS, IT
- *Exit strategy* *** Konsep resertifikasi




RASKIN

- Perbaikan *targeting* - mengurangi *inclusion error*. *** Kartu Raskin
- Perbaikan sosialisasi hak penerima Raskin *** Kartu Raskin, Poster
- Pelibatan Pemda sebagai garda terdepan distribusi Raskin

JAMKESMAS

-  Perbaikan perhitungan aktuarial & desain institusional sebagai persiapan BPJS 2014 *** Studi
-  Integrasi Jamkesda

BSM

-  Perbaikan *targeting* – mengurangi *inclusion error* ***Kartu BSM
-  Mengubah periode pembayaran untuk menjaring *enrollment*
-  Peningkatan nilai bantuan pendidikan

Penetapan Sasaran Penerima Program

Menggunakan Basis Data Terpadu (BDT)



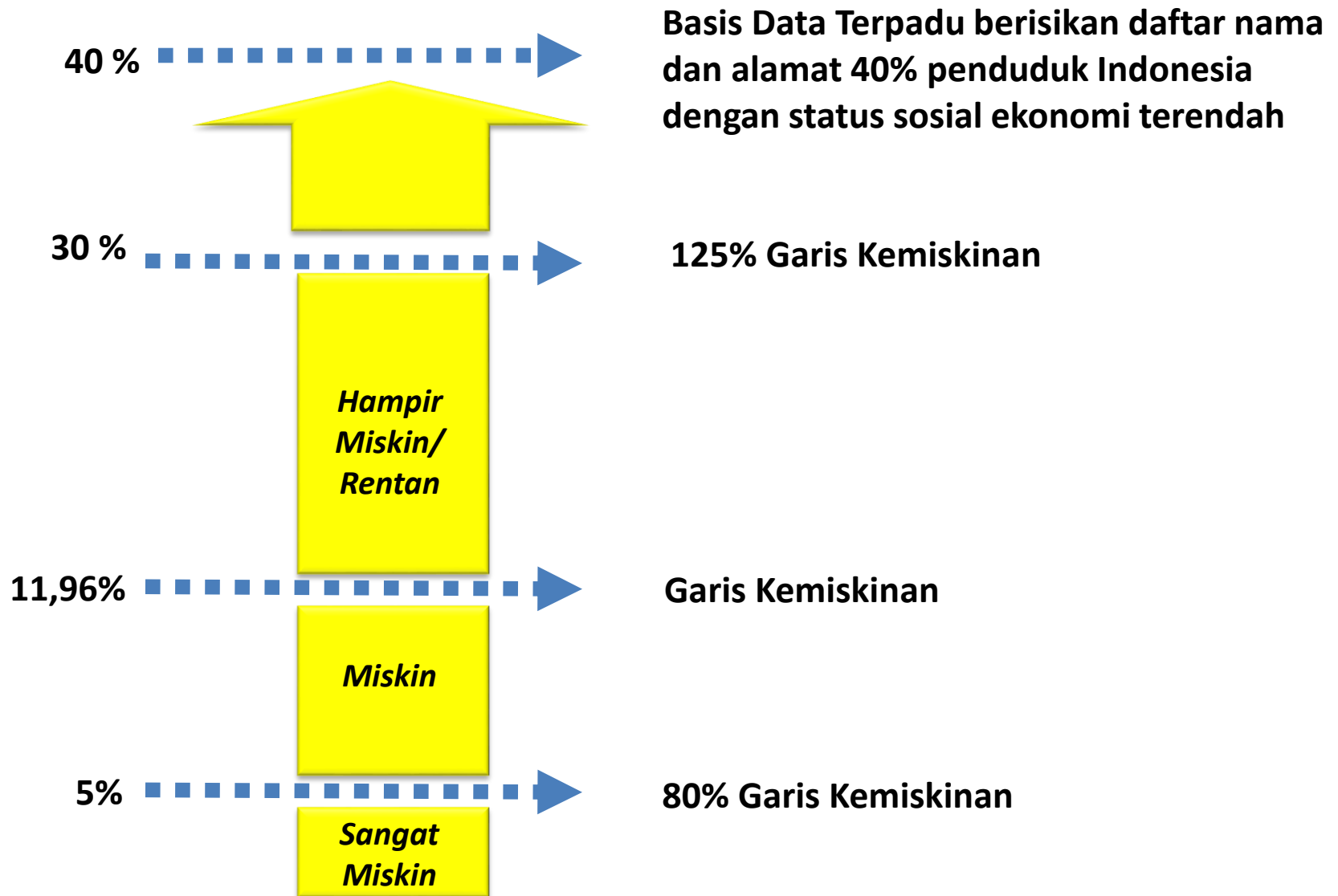
Kriteria kepesertaan untuk suatu Program Perlindungan Sosial ditetapkan oleh Menteri terkait

Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu. Saat ini BDT memiliki 40% RT dengan kesejahteraan terendah

Dihasilkan daftar nama dan alamat rumah tangga peserta masing-masing program

Keberadaan satu basis data (*unified*) akan memperbaiki ketepatan sasaran setiap Program Bantuan/Perlindungan Sosial. Saat ini BDT dikelola oleh Sekretariat TNP2K.

CAKUPAN BASIS DATA TERPADU



PENGELOLAAN BASIS DATA TERPADU

- Dikelola oleh Unit BDT-TNP2K, Basis Data terpadu sejak 2012 telah digunakan oleh Jamkesmas, PKH, BSM, Raskin
- Jumlah permintaan data dari BDT periode Februari-Agustus 2012:
 - Kementerian/Lembaga : 19 permintaan data
 - Pemerintah Provinsi : 41 permintaan data
 - Pemerintah Kab/Kota : 271 permintaan data
- Data nama & alamat disediakan untuk penyelenggaraan Program Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan menghormati **prinsip kerahasiaan data individu**
- Sedang diupayakan untuk bekerjasama dengan database Adminduk Kemdagri, dan database *Financial Identification Number* (FIN) Bank Indonesia
- Penanganan **keluhan kepesertaan** (*exclusion error*) → Pekerjaan rumah besar

Financial Inclusion

Sistem Keuangan Yang Inklusif – Layanan keuangan adalah HAK seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang miskin & rentan

- Akses kredit --- **Salah kaprah!**
- Layanan keuangan memberi kemampuan untuk menabung, *income smoothing*, menjadi salah satu *coping mechanism* menghadapi krisis
- Banyak program Pemerintah yang dapat digunakan sebagai mekanisme memperkenalkan sistem keuangan (utamanya perbankan) kepada kelompok masyarakat miskin & rentan.
 - Pembayaran lewat bank untuk PKH, Bantuan Pendidikan, dll.

TERIMA KASIH

The bottom of the slide features two solid-colored rectangular blocks. The block on the left is a medium blue color and occupies approximately the left third of the width. The block on the right is a darker blue color and occupies the remaining two-thirds of the width. Both blocks extend from the bottom edge of the slide up to about the middle of the vertical space.